

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. “Realisasi Pendapatan Negara.” Keuangan, 2021.
<https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/2/realisasi-pendapatan-negara.html>.
- Brun, Jean-Pierre, Anastasia Sotiropouloi, Larissa Gray, Clive Scott, and Kevin M. Stephenson. *Asset Recovery Handbok A Guide for Practitioners*. 2nd ed. Washington: World Bank, 2021.
- Darussalam, and Danny Septriadi. *Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda: Panduan, Interpretasi, Dan Aplikasi*. Jakarta: DDTC, 2017.
- Direktorat Jenderal Pajak. “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2018.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2018.
- . “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2019.” Vol. 5250208. Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2019.
- . “Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Pajak 2020.” Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020.
- Direktur Jenderal Pajak. *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-24/PJ/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemblokiran Dan Penyitaan Harta Kekayaan Penanggung Pajak Yang Tersimpan Pada Bank Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, 2014.
- . *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-16/PJ/2017 Tentang Permintaan Informasi Dan/Atau Bukti Atau Keterangan Terkait Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*, 2017.
- Indaryani, Ariefina Sri, and Aniek Juliarini. “Menjawab Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Menuju Reformasi Perpajakan Indonesia.” *InFestasi* 16, no. 1 (June 2020): 44–57. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6889>.

Istiyah, Risa Nur, Ratih Nur Pratiwi, and Stefanus Pani Rengu. “Efektivitas Penyitaan Harta Kekayaan Milik Wajib Pajak Badan Dalam Rangka Mengurangi Tunggakan Wajib Pajak (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Utara).” *Jurusan Administrasi Publik* 2, no. 3 (2014): 452–57.

Kementrian Keuangan. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2017 Tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional*, n.d.

———. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 70/PMK.03/2017 Tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*, 2017.

———. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*, 2017.

———. *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 189/PMK.03/2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Atas Jumlah Pajak Yang Masih Harus Dibayar*, 2020.

Mardiasmo. *Perpajakan*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2019.

Nurisdianto, W. E. “Betapa Krusialnya Pajak Dalam Portal Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara.” Direktorat Jenderal Pajak, July 19, 2019. <https://www.pajak.go.id/id/artikel/betapa-krusialnya-pajak-dalam-portal-kehidupan-berbangsa-dan-bernegara>.

Onasis, Dini. “Pengaruh Penerapan AEOI (Automatic Exchange of Information), Sanksi Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Pada

Kpp Pratama Pekanbaru Senapelan.” *Jurnal Ilmu Komputer Dan Bisnis* 10, no. 1 (2019).

Pusdiklat Pajak. *Modul Mapping Dan Pembuatan Profile WP*. Jakarta: Pusdiklat Pajak, 2008.

Republik Indonesia. *Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Pemberian Dan Penghimpunan Data Dan Informasi Yang Berkaitan Dengan Perpajakan*, 2012.

———. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan*, 2017.

———. *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, 2021.

———. *Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, 2017.

———. *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, 2009.

———. *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*, 2000.

- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017.
- Saunders, Mark N. K., Philip Lewis, and Adrian Thornill. *Research Methods for Business Students*. 8th ed. Harlow: Pearson, 2019.
- Subroto, Gatot. *Pajak & Pendanaan Peradaban Indonesia*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2020.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretatif, Interaktif Dan Konstruktif)*. Bandung: CV ALFABETA, 2018.
- Suwartono. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.
- Walewangko, Tingkan Larosa Ursula. “Analisis Efektivitas Pencairan Tunggal Pajak Aktif Dengan Penyitaan Terhadap Pencairan Tunggal Pajak Di KPP Pratama Ambon.” *Jurnal EMBA* 799, no. 1 (2016): 799–806.
- Zulfina, Susi, and Yosep Purnomo. *Bahan Ajar Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2014.
- Zuraida, Ida. *Bahan Ajar Penagihan Dan Sengketa Pajak*. Jakarta: Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, 2010.